PENERAPAN COMMUNITY BASED CORRECTION DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

¹Deny Ainun Sifa, ²Mitro Subroto

Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

e-mail correspondence: kevinfebian604@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

Jl. Raya Gandul No.4, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16512

Abstract

The purpose of this research is to know and understand the application of Community Based Correction in the Correctional System in Indonesia according to the concept of Community Based Correctional which is a concept that is in line with the goal of correctional, namely social reintegration.

This research method is descriptive using qualitative methods and a sociological approach. This research is an attempt to describe social phenomena that become a problem in community-based WBP development without performing a hypothesis and descriptive statistical calculations, not in a narrow sense. The results of the research after being identified, constructed, compiled and analyzed using qualitative methods based on theories, principles and legal norms related to the subject matter.

The results show that alternative philosophies have developed, namely community-based corrections and restorative justice. These two philosophies are closely related to the goals expected in correctional facilities, namely to seek the reintegration of the WBP with the community. Community-based corrections are a type of coaching program for WBP at the end of their criminal period where they are given the opportunity to return to the midst of society with certain supervision or supervision.

Keywords: *Communtiy Based Correctional; Correctional; Correctional Inmates*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Penerapan *Community Based Correction* dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia sesuai konsep *Communtiy Based Correctional* merupakan konsep yang sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial.

Metode Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan sosiologis (*social legal approach*). Penelitian ini sebagai upaya untuk menggambarkan fenomena-fenomena sosial yang menjadi suatu permasalahan dalam pembinaan WBP berbasis masyarakat tanpa melakukan suatu hipotesis dan perhitungan secara statistik deskriptif bukan dalam arti sempit. Hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori, asas-asas serta norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkembang filosofi alternatif yaitu *community-based corrections* dan *restorative justice*. Kedua filosofi ini sangat erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang diharapkan dalam pemasyarakatan, yaitu mengupayakan terintegrasikannya kembali WBP dengan masyarakatnya. *Community-based corrections* adalah jenis program pembinaan bagi WBP diakhir masa pidananya dimana mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan pengawasan atau supervisi tertentu.

Kata Kunci: *Communtiy Based Correctional; Pemasyarakatan; Warga Binaan Pemasyarakatan*

PENDAHULUAN

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan lebih menjunjung tinggi hak-hak WBP, meskipun demikian harus dilihat derita yang menyebabkan WBP mungkin akan mengalami gangguan fisik (kabur) atau gangguan psikis (kejiwaan), jadi dalam pelaksanaannya dapat dilakukan assessment dan pengawasan yang baik, tidak menekan dan tidak terlalu longgar dalam menerapkan pembinaan kepada WBP, tetapi perlu ada perencanaan pembinaan yang matang sesuai hasil assessment agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, serta WBP yang dibina juga matang secara emosional dan intelektual yang menyebabkan mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan baik, tanpa adanya deskriminasi apapun.

Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana pemidanaan dan merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan. Pembinaan dilakukan dengan pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Seiring dengan peran tersebut, maka petugas pemasyarakatan yang melaksanakan segala tugas pembinaan dan pengamanan bagi WBP dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah ditetapkan sebagai aparat penegak hukum (Hamja, 2016).

Sistem pemasyarakatan selain bertujuan untuk membina WBP supaya menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum yang ada, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan adanya pengulangan tindak pidana oleh mantan warga binaan pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang harus segera dilakukan reorientasi karena masih menggunakan bentuk sanksi berupa pidana penjara. Lembaga Pemasyarakatan adalah institusi dari sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi sebagai pelaksana pidana penjara dan merupakan tempat pembinaan bagi WBP. Setiap penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku suatu kejahatan merupakan hal yang sangat rentan karena masalah pemberian pidana apapun bentuknya berkaitan dengan Hak Asasi seseorang yang dijatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana bukan merupakan bentuk pembalasan negara tetapi pidana harus bersifat objektif dan berorientasi ke depan. sehingga, antara pemberian sanksi pidana dengan pelaku tindak pidana harus terdapat kesepakatan, sehingga tujuan diberi kannya dalam penjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan karakter dari pelaku tindak pidana. Namun dewasa ini muncul persoalan di sekitar kehidupan WBP ketika menjalani masa pidana di

lembaga pemasyarakatan. Contohnya adalah keributan antara sesama WBP, perlakuan para petugas lembaga pemasyarakatan terhadap WBP, pelarian WBP dan pembunuhan antarr sesama WBP. Hal inilah yang memunculkan kritik terhadap Institusionalisasi penghukuman yang dilakukan di dalam penjara. Hal ini mengakibatkan sejumlah konsekuensi antara lain deprivasi (masalah penderitaan yang dialami WBP akibat kehidupan penjara), subkultural WBP, proses prisonisasi (proses pembelajaran WBP dalam lingkungan penjara) maupun kegagalan proses sistem pemidanaan, khususnya pidana penjara, masih berlangsung. Persoalan-persoalan tersebut di atas ternyata sering mewarnai situasi di berbagai lembaga pemasyarakatan di mana saja, khususnya di Indonesia. Hal ini memunculkan pemikiran adanya kritik terhadap institusionalisasi terhadap sistem pemberian pidana terhadap para pelaku pelanggaran hukum yang ada di Indonesia yang diterapkan dalam Integrated criminal Justice System (sistem peradilan pidana terpadu) utamanya terhadap proses pembinaan (post adjudication) untuk mengembalikan pelaku kriminal dalam rangka proses reintegrasi sosial yang selama ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan. Untuk itu ada tuntutan yang berkembang dalam masyarakat munculnya Deinstitutionalisasi terhadap pemberian pidana bagi para pelaku tindak pidana yaitu memberikan hukuman di luar jeruji besi yang dianggap memunculkan masalah baru. Artinya semboyan mengatasi masalah tanpa masalah, membuat hidup lebih hidup tak berlaku disini, yang ada malah menambah masalah dan membuat hidup jadi redup. Situasi inilah yang mendorong munculnya CBC ("Community Based Correction") yaitu memberikan pidana di tengah masyarakat. Sesuai yang kami dapat tidak hanya munculnya alternatif pemenjaraan akan tetapi muncul alternatif pemidanaan. Tujuan sistem pemasyarakatan seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 UU No. 12 Thn 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa "sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab". Sehingga sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Narapidana kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Maka diperlukan suatu upaya pembinaan yang berbasis masyarakat atau "*Community Based Correction*" dalam upaya mengembalikan individu yang bermasalah tersebut. *Community Based Correction* merupakan suatu metode baru untuk mengintegrasikan WBP agar nantinya dapat kembali ke kehidupan masyarakat. Aktivitas ini merupakan usaha penyatuan komunitas agar dapat mengintegrasikan WBP ke dalam lingkungan masyarakat. Diharapkan dari konsep ini adalah tujuan pemidanaan yang berfungsi untuk

mengintegrasikan kembali WBP dengan masyarakat. Tidak lagi berfungsi sebagai media pembalasan dendam korban dan masyarakat melalui instrumen negara. Yang tercantum di 10 Prinsip Pemasyarakatan, yaitu :

1. Ayomi juga dengan berikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, WBP harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada WBP tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
9. WBP hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Tersedianya sarana dan sarana (termasuk bangunan) yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem.

METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan sosiologis (*social legal approach*). Penelitian ini sebagai upaya untuk menggambarkan fenomena-fenomena sosial yang menjadi suatu permasalahan dalam pembinaan WBP berbasis masyarakat tanpa melakukan suatu hipotesis dan perhitungan secara statistik deskriptif bukan dalam arti sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode ilmiah. Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Pada penelitian hukum sosiologis yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. Hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori, asas-asas serta norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Hamja, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran konsep Community Based Correction menurut Richard W. Snarr ialah mengacu kepada pola social reintegration, dimana pola tersebut ialah menggunakan segala kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya untuk menyatukan kembali (reintegration) WBP dengan masyarakat atau juga dapat disebut juga sebagai Community Based Correction. Pembinaan terhadap WBP bukan hanya di luar tembok penjara (institutional treatment) tetapi juga pembinaan dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, asalkan tetap melibatkan peran serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu peran serta masyarakat harus ada, apabila akan menetapkan konsep Community Based Correction. Pola reintegrasi sosial diharapkan mampu merubah perilaku WBP melalui interaksi dengan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat, hal tersebut berguna bagi pemulihan kembali hubungan antara WBP dengan masyarakat. Melalui metode *Community Based Correctional* memungkinkan Warga Binaan Pemasyarakatan membina hubungan lebih baik, sehingga dapat mengembangkan hubungan baru yang lebih positif. Tujuan utama Community Based Correctional ini adalah untuk mempermudah WBP berinteraksi kembali dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penerapan Community-based corrections perlu didasarkan pada standar kriteria sebagai berikut :

1. Lokasi pembinaan yang memberikan kesempatan bagi WBP untuk berinteraksi dengan masyarakat.
2. Lingkungan yang memiliki standar pengawasan yang minimal
3. Program pembinaan seperti pendidikan, pelatihan, konseling dan hubungan yang didasarkan kepada masyarakat
4. Diberikan kesempatan untuk menjalankan peran sebagai warga masyarakat, anggota keluarga, siswa, pekerja dan lain lain.
5. Diberikan kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan diri.

Pelaksanaan *Communtty Based Correctional* dalam sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai penghubung antara WBP dan masyarakat luar . Jika WBP hanya mendapatkan program pembinaan di dalam Lapas saja , maka mereka tidak akan pernah bersosialisasi dengan dunia luar selama menjalankan masa pidananya. Beda halnya apabila adanya peran serta masyarakat, jadi masyarakat luar bisa datang mengunjungi WBP atau biasa disebut besuk, atau mengadakan program integrasi (Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga) maka itu akan berpengaruh pada perubahan sikap-sikap positif yang ditunjukan oleh WBP sehingga program-program pembinaan dianggap berhasil . CBC ini memang sangat diperlukan di pola pembinaan untuk WBP. CBC tidak terbatas pada alternatif pemenjaraan saja, tapi mendorong alternatif

terhadap pemidanaan itu sendiri. Pemasyarakatan memandang pembinaan tidak hanya dilakukan di dalam lembaga, namun diperlukan lingkungan di luar lembaga dimana WBP berinteraksi dengan masyarakat hingga diintegrasikan kembali. Reintegrasi adalah upaya yang dilakukan untuk memperbesar kemauan masyarakat untuk menerima kembali WBP dan mengurangi stigma yang sudah beredar di masyarakat tentang keburukan WBP, sehingga ketika bebas, mantan WBP diharapkan dapat hidup kembali secara normal sebagai anggota masyarakat. CBC tidak dapat hanya dipahami sebagai pembinaan berbasis masyarakat yang hanya terkait dengan fungsi lembaga pemasyarakatan. Saat ini konsep CBC telah digunakan dengan efektif dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia terbukti dengan banyaknya WBP yang bebas dengan menggunakan program seperti PB, CB, CMB .

Tetapi di sisi lain masih ada program-program dari CBC yang belum efektif diterapkan seperti pidana bersyarat, pekerjaan sosial, pidana denda, hal ini karena belum adanya aturan perundang-undangan yang kuat untuk mendukung hal tersebut sehingga program-program tersebut masih belum efektif diterapkan di Indonesia. Dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, WBP wajib melewati tahapan-tahapan pembinaan atau proses pemasyarakatan, dalam hal ini terdapat 3 (Tiga) Tahapan Pembinaan, yakni:

1. Tahapan awal

Terhitung mulai dari 0-1/3 Masa pidana, ini merupakan tahapan awal bagi WBP dimana WBP mengenali, mengamati dan meneliti tempatnya, pembinaan yang diberikanpun masih pembinaan kepribadian guna untuk mengetahui dirinya sendiri dan lebih menyadari kesalahan yang telah dia perbuat, seperti pembinaan agama, pembinaan berbangsa dan bernegara, pembinaan kecerdasan, dan pembinaan kesadaran hukum.

2. Tahap Lanjutan

Tahap lanjutan terbagi dua yaitu tahap lanjutan awal dan tahap lanjutan akhir, tahap lanjutan awal terhitung mulai dari 1/3-1/2 masa pidana, pembinaan yang diberikan ada dua jenis yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan tahap lanjutan ke-dua mulailah diterapkannya pembinaan berbasis masyarakat atau Community Based Corrections, pada tahapan ini telah diberikan asimilasi dan lain-lain.

3. Tahap Akhir

Terhitung mulai dari 2/3 masa pidana sampai bebas. WBP diberikan integrasi dan mulai aktif kembali berhubungan masyarakat .

Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Pemasyarkatan Terbuka dengan Sistem *Community Based Corrections*

Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Pemasyarkatan Terbuka dengan Sistem *Community Based Corrections* Sebelum sampai pada pembahasan pelaksanaan lapas

terbuka, perlu di uraikan terlebih dahulu mengenai posisi lapas terbuka di dalam sistem peradilan pidana. Suatu sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem ini berupa kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga koreksi, mengingat peranannya yang semakin besar, para penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebuah sub sistem inilah yang dinamakan struktur hukum (legal structure). Lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai bagian dari sub- sistem peradilan pidana terpadu, lapas terbuka mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga pembinaan lanjutan. Kedudukannya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu rehabilitasi dan resosialisasi WBP, bahkan bisa sampai pada penanggulangan kejahatan. Sebagai lembaga pemasyarakatan yang baru dibentuk, maka posisi keberadaan lembaga pemasyarakatan terbuka mempunyai tujuan dalam rangka mensukseskan tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terkait dengan kedudukan lembaga pemasyarakatan terbuka sebagai sub-sistem peradilan pidana dapat diperoleh gambaran bahwa, lembaga pemasyarakatan terbuka berbeda dengan lembaga pemasyarakatan. pada umumnya karena lapas terbuka hanya mengambil sebagian kewenangan tugas dan tanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan tertutup. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan terbuka mengedepankan pembinaan *Community Based Corrections* atau pembinaan yang melibatkan masyarakat, lebih kekeluargaan, dengan pengamanan yang minimum serta tanpa jeruji besi dan tembok tebal. Pemikiran konsep *Community Based Correction* menurut Richard W. Snarr ialah mengacu kepada pola *social reintegration*, dimana pola tersebut ialah menggunakan segala kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam upaya untuk menyatukan kembali (*reintegration*) WBP dengan masyarakat atau juga dapat disebut juga sebagai *Community Based Correction*. Pembinaan terhadap WBP bukan hanya di luar tembok penjara (*institutional treatment*) tetapi juga pembinaan dilakukan di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, asalkan tetap melibatkan peran serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu peran serta masyarakat harus ada, apabila akan menetapkan konsep *Community Based Correction*. Pola reintegrasi sosial diharapkan mampu merubah perilaku WBP melalui interaksi dengan sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat, hal tersebut berguna bagi pemulihan kembali hubungan antara WBP dengan masyarakat. Untuk mencapai hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Menurut Mc.Carthy diperlukan petunjuk operasionalisasi *halfway house* yang menyangkut issue-isue yang berhubungan dengan pemilihan peserta (*target population selection*), pemilihan lokasi (*location and system selections*) petugas pelatihnya (*personel and training*), pelayanan pembinaan (*treatment service*), dan keamanan (*security*). Selanjutnya akan diuraikan menurut hasil penelitian di lapangan sebagai berikut:

1. Faktor Wilayah (Geographic Location)

Wilayah tersebut cakupannya cukup luas dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda dan sangat beragam, keragaman ini mencakup dalam hal, jenis mata pencaharian, jenis keterampilan, misalnya di bidang industri, bidang pertanian, dan lain- lain. Di samping itu terdapat keragaman pada sifat wilayah itu sendiri, daerah urban/perkotaan atau pedesaan. Menurut hasil penelitian hal tersebut sulit untuk dapat dipenuhi, disebabkan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat, antara lain faktor

wilayah lapas terbuka Jakarta wilayah cakupannya terlalu luas dengan karakteristik dengan wilayahnya yang sangat beragam, baik dalam mata pencaharian ataupun sifat wilayahnya itu sendiri.

Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketidak cocokan antara karakteristik warga binaannya dengan pelayanan pembinaan jenis keterampilan yang sudah tersedia. Jenis keterampilan

kerja yang tersedia adalah sebagian besar jenis keterampilan pada masyarakat pedesaan, sedangkan sebagian besar narapidana yang dibinanya dari daerah perkotaan.

a) Faktor Usia (Age)

Faktor usia WBP yang akan ditempatkan di lapas terbuka Jakarta merupakan faktor yang penting, usia WBP harus diseleksi sedemikian rupa, tujuannya jika WBP yang usianya terlalu muda ada kemungkinan akan mengalami kesulitan memasuki dunia kerja, sedangkan WBP yang usianya terlalu tua akan mengalami kesulitan pada jenis pekerjaan yang sesuai dengan WBPnya yang luas ada di masyarakat. Kewenangan menyeleksi WBP lapas terbuka Jakarta tidak mempunyai wewenang atau memilih siapa saja WBP yang akan menjadi warga binaannya. Dalam hal ini proses penerimaannya (*referral*), lapas terbuka Jakarta bersifat pasif, artinya menerima siapa pun WBP yang dikirim oleh lapas-lapas tertutup yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek).

b) Jenis Kelamin (Sex)

Menurut McCarthy, jenis kelamin merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan, hal tersebut guna untuk dapat memastikan bahwa disana cukup penghuni (warga binaan) untuk mencapai tujuan *halfway house*. Penempatan WBP berdasarkan dari jenis kelamin (*sex*) dapat disimpulkan bahwa, dalam lapas terbuka Jakarta saat ini belum bisa mengakomodir pembinaan WBP perempuan, yang disebabkan beberapa hal diantaranya, menyangkut jumlah WBP perempuan yang masih relatif sedikit, faktor keamanan yang kurang memadai, faktor pembinaan pelayanan yang

belum mencukupi, dan faktor sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar internasional (*Standard Minimum Rules/SMR*).

c) Waktu Tinggal WBP (*Length of Stay*)

Lamanya waktu tinggal berdasarkan sisa masa tahanan yang dijalani, dapat menentukan peserta di lapas terbuka, lamanya waktu tinggal harus disesuaikan dengan program yang ada di lapas terbuka. Karena seorang WBP yang hanya memiliki sisa hukuman 3 (tiga) bulan saja tidak cocok tinggal di lapas terbuka karena tidak dapat mengambil keuntungan dari program yang memerlukan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. Oleh karena itu diperlukan ketentuan batas minimum waktu tinggal di lapas terbuka harus disesuaikan dengan program yang ada.

Di dalam lapas terbuka Jakarta sasaran dan tujuan sudah ditetapkan, namun sasaran dan tujuan tersebut masih bersifat umum belum spesifik sehingga akan sulit untuk menentukan ukuran keberhasilan dan menentukan waktu pencapaiannya. Penentuan tujuan dan sasaran program masih sangat umum, pada gilirannya akan menyulitkan pihak lapas terbuka dalam menentukan berapa waktu tinggal (*length of stay*) minimum dari WBP yang akan ditetapkan di dalamnya. Dikatakan pula oleh sumber yang sama pada pihak lapas terbuka Jakarta menemui kesulitan untuk menentukan metode dan strategi, pencapaian serta pengukuran tingkat keberhasilan pembinaan sebagai bahan evaluasi ke depan.

d) Faktor WBP yang Membahayakan

WBP yang membahayakan, emosional tidak dianjurkan untuk menjadi peserta pada lapas terbuka, alasannya dapat membahayakan yang lainnya ataupun masyarakat. Penempatan WBP di lapas terbuka Jakarta telah dilakukan secara selektif, artinya telah dilakukan pembatasan WBP dengan jenis pidana apa saja yang dapat dibina di lapas terbuka Jakarta. Berkaitan dengan jenis pidananya, penempatan WBP di lapas terbuka Jakarta, telah dilakukan secara selektif, artinya pihak lapas terbuka telah membatasi WBP dengan jenis tindak pidana apa saja yang dapat dibina di lapas terbuka Jakarta. Namun masih ada WBP dengan kasus-kasus tertentu yang masih dianggap sebagai kasus yang berbahaya (*Serius Crime*) yang sebenarnya perlu mendapatkan perhatian, yaitu tindak pidana kesusilaan, perkosaan/pencabulan.

e) Faktor Ketergantungan terhadap Narkotika dan Alkohol

WBP yang mengalami ketergantungan narkotika dan alkohol tidak diperkenankan menjadi peserta warga binaan lapas terbuka, hal ini kecuali ada petugas khusus yang bisa menangani ketergantungan narkotika dan alkohol.

2. Pemilihan Lokasi (*Location and Site Selection*)

Pemilihan lokasi lapas terbuka perlu mendapatkan perhatian, hal ini bertujuan untuk memfasilitasi WBP kembali ketengah masyarakat (reintegrasi) agar menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, diantaranya melibatkan secara bersama-sama unsur petugas (institusi lapas), WBP dan unsur masyarakat. Lokasi lapas terbuka Jakarta terletak dalam lingkungan lembaga atau institusi yang sama-

sama berada dibawah Kementrian Hukum dan HAM RI, yang menjadikan dalam operasionalisasi tidak ada kendala apapun, adanya penolakan dari lingkungan sekitarnya, letak lapas terbuka Jakarta relatif jauh dan terpencil dari lingkungan penduduk sekitar, hal yang demikian menurut penulis kurang menguntungkan bagi WBP, karena kurang memberikan kesempatan bagi WBP untuk mempelajari nilai-nilai kemasyarakatan.

3. Petugas dan Pelatihannya (*Personel and Training*)

Bicara petugas danpelatihannya (*Personel and Training*) lapas terbuka berdasarkan pada konsep aslinya adalah lapas terbuka dijalankan oleh para sukarelawan, namun sekarang dijalankan oleh

berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda, ada professional, ada dari bekas mantan

WBP. Menurut hasil penelitian, terkait dengan pelayanan pembinaan (*Treatment Services*) WBP di lapas terbuka Jakarta, tugas pegawai di bidang pembinaan komposisinya masih relatif sedikit bahkan belum kelihatan misalnya dengan konseling pribadi dan conseleing pendidikankalau dibandingkan dengan bidang lain, seperti di bidang keamanan atau bidang administrasi.

4. Keamanan (*Security*)

Menurut Mc.Carthy, *halfway house* didesain sebagai fasilitas dengan pengamanan minimum dan mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang sewajarnya. Pengawasan terhadap peserta tetap diperlukan. Strategi keamanan yang dilakukan oleh jajaran Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Lapas terbuka Jakarta untuk mengantisipasi terjadinya gangguan

keaman- an dan ketertiban adalah dengan cara pendekatan personel terhadap masingmasing

individu nara- pidana (*Personality Approach*). Strategi ini terbukti berjalan efektif dan berjalan lancar, terhadap kasus gangguan keamanan yang terjadi cenderung relatif rendah.

Model Pembinaan WBP melalui *Community Based Correction* di Masa Akan Datang

Kedudukan lapas terbuka sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana dapat diperoleh gambaran bahwa lapas terbuka berbeda dengan lapas pada umumnya (lapas tertutup), karena lapas terbuka hanya mengambil sebagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab dari lapas tertutup. Selain itu lapas terbuka mengedepankan pembinaan *Community Based Corrections*, atau pembinaan yang melibatkan masyarakat, lebih kekeluargaan, dan dengan pengamanan yang minimum (*minimum security*) serta tanpa adanya jeruji besi seperti lapas tertutup. Lapas terbuka merupakan lapas yang secara khusus membina WBP untuk dikembalikan ke masyarakat melalui tahap asimilasi. Jadi lapas terbuka hanya mengkhususkan bagi WBP yang telah mencapai tahapan pembinaan ketiga berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10.13/3/1 tanggal 8

Februari 1965, yaitu tahap keamanan yang minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini diharapkan WBP sudah menunjukkan kemajuan positif baik mental maupun spiritual serta keterampilan lainnya, dan yang paling penting telah siap untuk berasimilasi dengan masyarakat. Secara singkat dapat disimpulkan sebagai berikut: pembentukan lapas terbuka di Indonesia merupakan model yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan pembinaan terhadap WBP dalam sistem pemasyarakatan di masa yang akan datang, mengingat keberadaan lapas terbuka yang sangat strategis dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hal utama yang menjadi output lembaga pemasyarakatan terbuka adalah reintegrasi juga meninggalkan bentuk-bentuk kekerasan, kekerasan dan penindasan maupun kebrutalan terhadap WBP, dan yang paling penting adalah dapat diterima kembali WBP di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Terdapat 5 (lima) prinsip dasar *community-based corrections* yang menjadi landasan bagi keberadaan Lapas terbuka: prinsip pertama WBP harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, prinsip kedua WBP harus diseleksi terlebih dahulu, prinsip ketiga WBP tidak boleh dieksploitasi, prinsip keempat sistem pengamanan harus minimum, dan prinsip kelima tanggung jawab pemindahan WBP. Terkait dengan filosofi perkembangan dalam pemidanaan, pasca filosofi reintegrasi sosial, maka saat ini berkembang filosofi alternatif yaitu *community-based corrections* dan *restorative justice*. Kedua filosofi ini sangat erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang diharapkan dalam pemasyarakatan, yaitu mengupayakan terintegrasikannya kembali WBP dengan masyarakatnya. *Community-based corrections* adalah jenis program pembinaan bagi WBP diakhir masa pidananya dimana mereka diberikan kesempatan untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan pengawasan atau supervisi tertentu.

Dari pembahasan tersebut diatas, maka saran dari penulis tentang pelaksanaan pemberdayaan lapas terbuka dengan metode Community Based Correction sebagai untuk pencapaian tujuan pemasyarakatan yang sesuai yang di amanatkan pada Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Perlu Support oleh beberapa aspek, antara lain aspek petugas lapas, masyarakat dan WBP nya itu sendiri. Sehingga keinginan dan tujuan sistem pemasyarakatan bisa tercapai seperti tujuan pemasyarakatan yaitu integrasi sosial yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan WBP dengan masyarakatnya. selanjutnya, sebagai lapas terbuka bertugas melaksanakan program pembinaan WBP dengan tahap asimilasi bagi WBP yang sudah mencapai tahap pembinaan.

REFERENSI

- Fajar, M. and Ahmad, Y., 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, M. and Ahmad, Y., 2006. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: FH UMY.
- Fajriando, H., 2019. Evaluasi Pelaksanaan Community-Based Corrections di Lapas Terbuka Kelas III Rumbai. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), p.323.
- Firdaus, I., 2019. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), p.339.
- Hamja, H., 2016. MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED CORRECTIONS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), p.445.
- Haryono, H., 2018. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), p.295.
- Mahmud Marzuki, P., 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Nolasco, C., Vaughn, M. and del Carmen, R., 2010. Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice. *Journal of Criminal Justice Education*, 21(1), pp.1-23.
- Nugraha, A., 2020. Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1), pp.141-151.
- Saputra, F., 2020. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), p.1.
- Waluyo, B., 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.